



LAPORAN KEGIATAN KOMISI VI DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023-2024
Tanggal 5 Maret – 13 Mei 2024
(Masa Sidang Mulai Tanggal 5 Maret – 4 April 2024
Dan Masa Reses Mulai Tanggal 5 April – 13 Mei 2024)
Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI
Tanggal 6 Februari 2024

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 adalah sebagai berikut:

I. FUNGSI LEGISLASI

Terkait dengan Fungsi Legislasi, pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 Komisi VI DPR RI tidak melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Legislasi.

II. FUNGSI ANGGARAN

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Komisi VI DPR RI tidak melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Anggaran.

III. FUNGSI PENGAWASAN

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

1. Rapat Pimpinan Komisi VI DPR RI pada tanggal 5 Maret 2024, dengan acara membahas program kerja Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 dan lain-lain.
2. Rapat Intern Komisi VI DPR RI pada tanggal 5 Maret 2024 dengan acara membahas dan menyusun program kerja Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 dan lain-lain.
3. Rapat Intern Komisi VI DPR RI pada tanggal 1 April 2024 dengan acara Penyesuaian Program Kerja Masa Sidang IV Tahun sidang 2023-2024.
4. Rapat Intern Komisi VI DPR RI pada tanggal 2 April 2024 dengan acara Penetapan Ketua dan Anggota Panja PT Timah Tbk.

A. RAPAT KERJA/RDP/RDPU/PANJA KOMISI VI DPR RI

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Menteri Perdagangan RI dengan menghadirkan pula Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT PTPN III (Persero). Pembahasan terkait dengan persediaan pangan, stok dan harga pangan. Dengan kesimpulan antara lain :
 - 1) Komisi VI DPR RI mendesak Pemerintah agar memberikan langkah konkret dalam mengawasi keberadaan stok, distribusi dan stabilisasi harga pangan dan bahan pokok, khususnya pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2024/1445 H.
 - 2) Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan RI agar mempersiapkan mitigasi risiko jangka pendek, menengah dan panjang yang akan dijalankan pemerintah serta dilaporkan kepada Komisi VI DPR RI secara berkala, terutama dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan, sehingga inflasi dan stok barang dapat dikendalikan.
 - 3) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) / ID FOOD terkait, Perum Bulog dan PTPN III (Persero) agar mengawasi keberadaan stok, distribusi dan stabilitas harga pangan dan bahan pokok dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024/1445 H.

- 4) Komisi VI DPR RI meminta Perum Bulog untuk memprioritaskan penyerapan gabah petani lokal dan tidak melakukan impor beras di masa panen raya.
 - 5) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) / ID FOOD, Perum Bulog dan PTPN III (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada tanggal 19 Maret 2024 dengan Menteri BUMN RI, dengan pembahasan Kinerja BUMN, Progress Program Restrukturisasi BUMN, Perubahan Peruntukan PMN Utama Karya Tahun Anggaran 2024 Periode I, Konsultasi Rencana Privatisasi/Right Issue PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan lain-lain. Kesimpulan antara lain :
- 1) Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian BUMN yang berhasil mengkonsolidasikan laba BUMN sebesar Rp292 triliun (unaudited) dan memberikan dividen pada tahun 2023 sebesar Rp81,2 triliun.
 - 2) Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan atas kinerja BUMN serta rencana usulan dividen tahun anggaran tahun 2024, usulan PMN TA 2024, dan usulan PMN TA 2025.
 - 3) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian BUMN dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan PMN TA 2024 yang berasal dari Alokasi Pembiayaan Cadangan Investasi APBN 2024, dengan rincian sbb:
 - a. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 2 Triliun dalam rangka pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru
 - b. PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp 1,6 Triliun dalam rangka penyelesaian ruas tol Palembang – Betung
 - c. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp 1 Triliun dalam rangka penguatan permodalan
 - d. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 Triliun dalam rangka pembelian kapal penumpang untuk rute perintis
 - e. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 2 Triliun dalam rangka peningkatam kapasitas dan kualitas produksi

- f. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp 1 Triliun dalam rangka penguatan permodalan
 - g. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp 3 Triliun dalam rangka penguatan permodalan penjaminan KUR
- 4) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian BUMN dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan PMN TA 2025 dari Kementerian BUMN dan akan dibahas dalam masa persidangan berikutnya.
 - 5) Komisi VI DPR RI menyetujui perubahan alokasi PMN Tunai TA 2024 PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp 18,604 Triliun yang akan digunakan untuk pelaksanaan penugasan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I yang mengalami perubahan dari Rp 6,104 Triliun menjadi Rp 5,177 Triliun
 - b. Pembangunan Ruas Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung yang berubah dari Rp 10 Triliun menjadi Rp 13,427 Triliun
 - 6) Komisi VI DPR RI menyetujui aksi korporasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk melakukan *rights issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2024 sebesar Rp 6 Triliun.
 - 7) Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam permasalahan yang ada di PT. Taspen.
 - 8) Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk memberikan laporan evaluasi penggunaan dana PMN.
 - 9) Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk mensinergikan dan mengoptimalkan BUMN pangan, seperti PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/ID FOOD, PT. Pupuk Indonesia (persero), PT. Perkebunan Nusantara dan Perum BULOG untuk berperan lebih dalam mengatasi krisis pangan dan menjaga kedaulatan pangan.
 - 10) Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk mengevaluasi dan terus meningkatkan program listrik perdesaan PT. PLN (Persero).

- 11) Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya terkait penyelesaian kredit macet UMKM melalui kebijakan hapus buku dan hapus tagih.
 - 12) Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN agar berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya terkait kelangkaan gas industri untuk mencegah terjadinya deindustrialisasi.
 - 13) Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
3. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada tanggal 19 Maret 2024 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI, pembahasan mengenai Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 dan lain-lain. Dengan kesimpulan rapat antara lain :
- 1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri Koperasi dan UKM RI terkait evaluasi pelaksanaan kinerja Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2023 dan mengapresiasi capaian anggaran tahun 2023 sebesar 97,80 persen oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.
 - 2) Komisi VI DPR RI menerima Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk berkoordinasi dengan Pimpinan DPR RI dan lembaga terkait lainnya agar melanjutkan agenda pembahasan atas Rancangan UU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - 3) Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM RI atas dibukanya pabrik Minyak Makan Merah (3M) di Kabupaten Deli Serdang yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden RI pada 14 Maret 2024 lalu dan meminta agar kementerian Koperasi dan UKM RI untuk mengeskalasi hal serupa di tempat lain.
 - 4) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk melakukan evaluasi atas implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya.

- 5) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
4. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada tanggal 1 April 2024 dengan Menteri Investasi /Kepala BKPM RI. Pembahasan mengenai Progress Realisasi Investasi Tahun 2023 dan lain-lain. Dengan kesimpulan antara lain :
 - 1) Komisi VI DPR RI mengapresiasi capaian Kementerian Investasi/BKPM RI dalam realisasi investasi tahun 2023 yang berhasil melampaui angka investasi yang ditargetkan.
 - 2) Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Investasi/BKPM RI agar lebih memprioritaskan investasi yang dapat memberi kemanfaatan besar bagi penciptaan lapangan kerja, UMKM, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
 - 3) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi.BKPM RI untuk lebih rinci dalam menyampaikan data investasi, terkait sektor dan distribusi investasi di Jawa dan Luar Jawa.
 - 4) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/BKPM RI untuk memberikan data yang jelas dan detail terkait investasi dan investor di IKN.
 - 5) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/BKPM RI untuk menyampaikan laporan detail terkait kinerja Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
 - 6) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/BKPM RI untuk turut aktif dalam mencegah dan memberantas praktek-praktek mafia di sektor pertambangan.
 - 7) Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi/BKPM RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
 5. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 20 Maret 2024 dengan BUMN Perbankan yaitu Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., Direktur Utama PT Bank Mandiri, Tbk., Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia, Tbk., dan Direktur Utam PT Bank BTN, Tbk. Pembahasan mengenai Evaluasi Kinerja

Korporasi Tahun 2023, Strategi Mitigasi menghadapi Potensi Resesi Ekonomi 2024, Rencana Akuisisi Bank Muamalat, dan lain-lain. Dengan kesimpulan antara lain :

- 1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan sekaligus memberi apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, terkait peningkatan kinerja, setoran deviden, dan kontribusi pajak di tahun 2023.
- 2) Komisi VI DPR RI meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menggencarkan program-program sosialisasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan jasa perbankan di masyarakat.
 - b. Meningkatkan akses dan kemudahan kredit bagi pelaku UMKM dan ultra mikro.
- 3) Komisi VI DPR RI meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk melakukan upaya strategis dalam rangka mengurangi *blacklog* perumahan (kesenjangan antara kebutuhan perumahan dengan unit yang tersedia) yang masih tinggi.
- 4) Komisi VI DPR RI meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, untuk mengantisipasi rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dan dampak situasi perekonomian global beserta potensi resesi ekonomi di tahun 2024.
- 5) Komisi VI DPR RI meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

6. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Pembahasan mengenai Kesiapan PT Pertamina Persero menghadapi Mudik Puasa dan Hari Raya Idul Fitri 1445H. Dengan kesimpulan antara lain:
- 1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan sekaligus memberi apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) terkait persiapan menghadapi mudik Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
 - 2) Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memastikan stok BBM dan LPG tetap aman dalam menghadapi lonjakan permintaan selama masa mudik Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H, terutama di jalur-jalur utama mudik.
 - b. Mempermudah masyarakat kelompok sasaran dalam mendapatkan BBM dan LPG Bersubsidi.
 - 3) Komisi VI DPR RI mendesak PT Pertamina (Persero) melakukan kontrol secara lebih intensif terhadap tingkat akurasi peneraan dispenser di seluruh SPBU dan SPBE Pertamina serta memberikan sanksi pencabutan ijin operasional bagi SPBU dan SPBE yang terbukti melakukan tindakan illegal dalam peneraan.
 - 4) Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina (Persero) untuk menjaga sistem kemitraan dengan pihak swasta dalam usaha pendistribusian BBM dan stok baterai listrik.
 - 5) Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
7. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 2 April 2024 dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), pembahasan mengenai Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 dan lain-lain. Kesimpulan antara lain :
- 1) Komisi VI DPR RI mendorong PT Pupuk Indonesia (Persero) / *Holding* BUMN Pupuk untuk menjamin penyediaan pupuk subsidi dan non subsidi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Pemerintah.

- 2) Komisi VI DPR RI mendorong PT Pupuk Indonesia (Persero) / *Holding* BUMN Pupuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses distribusi pupuk bersubsidi agar proses distribusi pupuk bersubsidi dilakukan secara efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Komisi VI DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) / *Holding* BUMN Pupuk untuk mengevaluasi mekanisme distribusi dan penebusan pupuk bersubsidi baik yang dilakukan di dalam maupun luar jaringan serta merancang perbaikan dan inovasi terkait mekanisme distribusi sehingga petani dapat memperoleh pupuk dengan mudah.
- 4) Komisi VI DPR RI mendorong PT Pupuk Indonesia (Persero) / *Holding* BUMN Pupuk untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja distributor pupuk.
- 5) Komisi VI DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) / *Holding* BUMN Pupuk untuk memaparkan rencana bisnis ke depan terkait dengan PT ReKayasa Industri.
- 6) Komisi VI DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) / *Holding* BUMN Pupuk, dalam hal ini pemerintah untuk meningkatkan penyediaan gas sebagai bahan baku dalam rangka peningkatan produksi pupuk.
- 7) Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) / *Holding* BUMN Pupuk untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
8. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 2 April 2024 dengan Direktur Utama PT Timah, Tbk., Pembahasan Evaluasi Kinerja Korporasi dan lain-lain, dengan kesimpulan antara lain :
 - 1) Komisi VI DPR RI meminta PT Timah Tbk menyiapkan laporan kinerja korporasi Tahun 2023 dengan memberikan data dan penjelasan yang lebih rinci terkait kasus korupsi yang melanda PT Timah Tbk.

- 2) Komisi VI DPR RI meminta PT Timah Tbk membuat rencana strategis perbaikan kinerja perusahaan, terutama akibat kasus yang tengah dihadapi PT Timah Tbk.
 - 3) Komisi VI DPR RI meminta PT Timah Tbk untuk dapat memberikan jawaban secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
9. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 3 April 2024 dengan Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Direktur Utama Perum Damri, dan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero). Pembahasan mengenai Kesiapan BUMN Jasa Logistik Dalam Menghadapi Mudik Puasa dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024, dan lain-lain. Dengan kesimpulan antara lain :
- 1) Komisi VI DPR RI mendukung upaya PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), Perum Damri dan PT Jasa Marga (Persero) dalam memastikan kesiapan BUMN Jasa Logistik dan Transportasi menghadapi Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024.
 - 2) Komisi VI DPR RI meminta PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), Perum Damri dan PT Jasa Marga (Persero) untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan armada transportasi untuk arus mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 yang memadai secara jumlah dan kualitas, memperhatikan protokol kesehatan, menjaga kebersihan, menjamin keselamatan penumpang serta mempersiapkan mitigasi bencana dalam rangka memastikan pelaksanaan arus mudik yang aman, nyaman dan lancar.
 - 3) Komisi VI DPR RI meminta PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), Perum Damri dan PT Jasa Marga (Persero) untuk melakukan koordinasi dengan instansi Kementerian/Lembaga terkait

kelancaran dan kebijakan tarif angkutan mudik yang terjangkau bagi masyarakat.

- 4) Komisi VI DPR RI meminta BUMN Jasa Logistik dan Transportasi untuk berkomitmen melakukan interkoneksi transportasi darat dan laut sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat serta membentuk satgas yang fokus pada pelayanan dan kebersihan selama lonjakan penumpang arus mudik Idul Fitri Tahun 2024.
 - 5) Komisi VI DPR RI meminta kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk menyempurnakan aplikasi pemesanan tiket Ferizy agar mempermudah akses penumpang saat mudik.
 - 6) Komisi VI DPR RI meminta PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), Perum Damri dan PT Jasa Marga (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
10. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 3 April 2024 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero). Pembahasan mengenai Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Keandalan Jaringan Pembangkit dan Elektrifikasi, dan lain-lain, dengan kesimpulan antara lain :
- 1) Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja keuangan PT PLN (Persero) pada tahun 2023 serta mendorong PT PLN (Persero) untuk memastikan ketersediaan, keandalan dan ketahanan energi listrik termasuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan melalui inovasi dan transformasi bisnis yang berkelanjutan.
 - 2) Komisi VI DPR RI meminta PT PLN (Persero) untuk memperluas elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dengan kualitas yang baik melalui optimalisasi Program Listrik Desa (Lisdes).
 - 3) Komisi VI DPR RI meminta PT PLN (Persero) untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memastikan pasokan listrik dan kualitas layanan yang terjaga selama periode libur Hari Raya Idul Fitri 2024.
 - b. Memastikan kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) beserta sarana pendukungnya dalam rangka mendukung para pemudik yang menggunakan kendaraan listrik.
 - 4) Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT PLN (Persero) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.
11. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Audiensi Serikat Pekerja PT Jakarta Internasional Container Terminal (SP JICT), dengan pembahasan mengenai perpanjangan kontrak JICT, dengan catatan rapat antara lain :
- 1) Komisi VI DPR RI menerima Audiensi dari Serikat Pekerja PT Jakarta Internasional Container Terminal (SP JICT) terkait Perpanjangan Kontrak JICT. Beberapa catatan dan masukan yang disampaikan antara lain :
 - a. Biaya sewa (rental fee) perpanjangan kontrak yang membebani JICT.
 - b. JICT membayarkan rental fee dengan skema tetap USD 85 juta/tahun, ditambah biaya konsensi ke pemerintah (Otoritas Pelabuhan) sebesar 2 persen dari pendapatan (\pm USD 5 juta/tahun) dari sebelum perpanjangan kontrak JICT membayarkan royalti kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebesar 15 persen dari pendapatan.
 - c. Rental fee dinilai JICT menjadi minim investasi.
 - d. JICT mengalami kerugian pertama kalinya pada tahun 2020, sehingga berdampak terhadap keberlangsungan JICT.
 - 2) Serikat Pekerja PT Jakarta Internasional Container Terminal (SP JICT) mengharapkan adanya solusi dari Komisi VI DPR RI untuk penyelesaian masalah tersebut, mengingat masalah yang terjadi terkait erat dengan BUMN terutama PT Pelindo.
 - 3) Terkait permasalahan yang disampaikan Serikat Pekerja PT Jakarta Internasional Container Terminal (SP JICT), Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman terkait permasalahan tersebut.

B. KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK/KUNJUNGAN KERJA RESES/KUNJUNGAN KERJA PENGAWASAN LUAR NEGERI KOMISI VI DPR RI

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan kunjungan kerja antara lain :

1. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan kinerja Perusahaan pada saat Ramadhan dan persiapan lebaran ke PT. Jasa Raharja Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 s.d 27 Maret 2024.
2. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan kinerja Perusahaan pada saat Ramadhan dan persiapan lebaran dengan PT. Angkasa Pura Indonesia, PT. Integrasi Aviasi Solusi, PT. Garuda Indonesia, PT. Citilink Indonesia dan PT. Garuda Angkasa di Bandara Soekarno Hatta Kota Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 25 s.d 27 Maret 2024.
3. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan kesiapan BUMN Anggota Holding Ultra Mikro pada saat Ramadhan dan Lebaran dengan PT. BRI, PT. Pegadaian, PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 s.d 27 Maret 2024.
4. Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dalam rangka peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan masyarakat serta perlindungan konsumen di Sektor Keuangan di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, pada tanggal 22 s.d 26 April 2024.
5. Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dalam rangka evaluasi pengembangan Bali Maritime Tourism Hub dan Ketahanan Energi ke Kota Denpasar di Provinsi Bali , pada tanggal 22 s.d 26 April 2024.
6. Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dalam rangka pengembangan sektor pariwisata Provinsi Bali beserta dukungan sarana transportasi dan infrastruktur di Kabupaten Badung Provinsi Bali, pada tanggal 22 s.d 26 April 2024

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023 – 2024.

Jakarta, 30 April 2024

KABAGSET KOMISI VI DPR RI,

TTD.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si
NIP. 19710407 199203 2 001